

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah Pengangguran merupakan salah satu masalah yang besar dan serius bagi seluruh negara di dunia. Pengangguran terjadi karena jumlah angkatan kerja atau pencari kerja lebih banyak daripada lapangan kerja yang tersedia. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi tidak sanggup menciptakan kesempatan kerja lebih cepat dari pertumbuhan penduduknya. Pengangguran adalah bagian dari struktur penduduk suatu negara. Pengangguran merupakan kelompok orang yang ingin bekerja, sedang berusaha mendapatkan (atau mengembangkan) pekerjaan tetapi belum berhasil mendapatkannya.¹

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka pengangguran di Indonesia periode Agustus 2019. Hasilnya Provinsi Banten menduduki peringkat pertama dengan tingkat pengangguran sebesar 8,11% angka ini jauh lebih besar dari rata – rata TPT

¹ Zaini Ibrahim, *Pengantar Ekonomi Makro*; (Banten: Koperasi Syariah Baraka, 2017), Edisi Cet. 3, h. 123.

nasional yaitu sebesar 5,13%. Kepala BPS Banten Adi Wiriana mengatakan, persentase jumlah pengangguran di Banten sebetulnya turun dibanding periode yang sama pada Agustus 2018 lalu yakni 8,52%. Namun, jumlah tersebut tetap menjadikan Banten berada di urutan paling bawah. Terbesar se Indonesia, nomor satu, dan lebih tinggi dari angka nasional, peringkat kedua adalah Jawa Barat. Kata Adhi ditemui di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Kota Serang, Selasa, (5/10/2019).

Provinsi Banten merupakan Provinsi hasil pemekaran Jawa Barat pada tahun 2000 dan menjadi Provinsi ke-28 di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000. Berdasarkan hasil pemekaran tersebut, secara administratif, terbagi atas 4 Kabupaten dan 4 Kota, yaitu Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, dan untuk 4 Kota yaitu Kota Tangerang, Kota Cilegon, Kota Serang dan Kota Tangerang Selatan, yang mana untuk Kota Serang dan Tangerang Selatan merupakan daerah baru hasil pemekaran pada tahun 2008 dan 2009.²

² “Geografi – Profil Provinsi” <https://www.bantenprov.go.id/profil-provinsi/geografi>, diakses pada 27 Maret 2020, pukul 16:30 WIB.

Berikut data TPT menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten. TPT di Provinsi Banten dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, yaitu tahun 2015 – 2019 mengalami fluktuasi. Ini terlihat pada tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2015 sebesar 9,55%, mengalami penurunan pada tahun 2016 menjadi 8,92%, namun pada tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 9,28%, pada tahun 2018 mengalami penurunan kembali menjadi 8,53% dan pada tahun 2019 menjadi 8,11%.

Provinsi Banten selain dikenal dengan julukan tanah para jawara, rupanya daerah di penghujung barat pulau Jawa ini juga juara soal tingkat pengangguran. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Banten paling tinggi dibandingkan dengan tingkat pengangguran provinsi lain di Indonesia. Tingginya angka pengangguran di Banten masih menjadi salah satu persoalan serius yang dihadapi pemerintah Provinsi Banten saat ini. Padahal Banten memiliki kawasan industri yang relatif cukup banyak yaitu pabrik – pabrik yang besar dan terkenal berada di Provinsi Banten . Belum lagi Banten ditopang dan di dukung sumber daya alam yang melimpah dan subur serta wilayah strategis sebagai penyangga Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia, DKI Jakarta. Namun,

ironisnya disisi lain tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Provinsi Banten berada pada posisi pertama tertinggi di Indonesia. Selain itu, realisasi investasi baik penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN) di Provinsi Banten selalu berada di posisi atas tingkat atas secara Nasional. Maka. Banten di juluki sebagai “Gerbang investasi” oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).³

Banyak Faktor yang dapat mempengaruhi pengangguran seperti yang disarankan oleh Bank Dunia yaitu: Menciptakan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan fleksibilitas dan investasi tenaga kerja, dan meningkatkan pekerjaan secara langsung. Menciptakan pertumbuhan ekonomi dengan mendorong laju investasi sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi. Namun peningkatan investasi perlu kerja keras karena pemerintah dan masyarakat harus menciptakan lingkungan yang kondusif untuk usaha.⁴

Berkat adanya dukungan pemerintah, melalui kebijakan penanaman modal menjadikan peluang investasi di Banten sangat

³ “Mencari Formulasi Atas Pengangguran Di Gerbang Investasi” <https://disnakertrans.bantenprov.go.id/>, diakses pada 22 Nov. 2019, pukul 21:45 WIB.

⁴ Zaini Ibrahim, *Pengantar Ekonomi Makroh*. 123.

besar. Sehingga, Provinsi Banten menjadi sasaran para investor untuk berinvestasi karena memiliki daya tarik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri yang sangat menjanjikan, juga didukung oleh kegiatan-kegiatan yang bersahabat dengan pasar. Sehingga menciptakan iklim dan lingkungan penanaman modal yang kondusif dari waktu ke waktu. Maka, nilai investasi Provinsi Banten baik penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN) terus meningkat secara signifikan dari tahun ke tahunnya. Peningkatan investasi merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan tingkat pendapatan, kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan taraf kemakmuran.⁵

Adanya kebijakan penanaman modal ini akan mempertegas upaya pemerintah dalam mengatur dan mengarahkan penanaman modal yang ada di Indonesia agar dapat memberikan kontribusi optimal. Kebijakan penanaman modal akan dapat memberi arah bagi upaya pembangunan penanaman modal di Indonesia serta

⁵ Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Mikroekonomi*; (Jakarta: Rajawali, 2000), h. 367.

menjadi kerangka landasan bagi pengaturan penanaman modal selanjutnya. tanpa suatu kebijakan penanaman modal tentunya akan berakibat pengembangan penanaman modal kita menjadi tidak jelas arahnya.⁶

Adanya investasi juga akan mendorong terciptanya barang modal baru sehingga akan menyerap faktor produksi baru yaitu menciptakan lapangan kerja baru atau kesempatan kerja yang akan menyerap tenaga kerja yang pada akhirnya akan mengurangi pengangguran.⁷

Berdasarkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), dapat diketahui bahwa realisasi penanaman modal asing (PMA) Provinsi Banten pada kurun waktu 5 tahun terakhir yaitu tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 mengalami fluktuasi yakni pada tahun 2015 nilai realisasi PMA sebesar US\$ 2.541.969 Ribu, pada tahun 2016 sebesar US\$ 2.912.062,10 Ribu, pada tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi US\$ 3.047.469,50 Ribu, namun, nilai realisasi PMA pada

⁶ Aminudin, *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia*; (Jakarta: Kencana, 2017), Cetakan Ke – 5, h. 39.

⁷ Priyo Prasoj, "Analisa Pengaruh Investasi PMA dan PMDN, Kesempatan Kerja serta Pengeluaran Pemerintah terhadap PDRB di Jawa Tengah Periode Tahun 1980-2006" (Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009), h. 2

tahun 2018 mengalami penurunan kembali menjadi US\$ 2.827.275,00 Ribu, dan sebesar US\$ 1.868.178,50 Ribu pada tahun 2019. Sedangkan, untuk nilai realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) Provinsi Banten pada tahun 2105 – 2019 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini terlihat pada nilai realisasi PMDN tahun 2015 sebesar Rp. 10.709.896,40 juta, pada tahun 2016 Rp. 12.426.311,10 juta, pada tahun 2017 sebesar Rp. 15.141.904,70 juta, pada tahun 2018 sebesar Rp. 18.637.561 juta dan pada tahun 2019 sebesar Rp. 20.708.397 juta.

Dengan hadirnya investasi penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) di Provinsi Banten mengakibatkan banyaknya investor yang menanamkan modalnya di Provinsi Banten. Hal ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian khususnya sektor ketenagakerjaan. Penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri harus mampu memberdayakan angkatan kerja dan menyerap banyak tenaga kerja lokal yang ada di Provinsi Banten sehingga jumlah pengangguran dapat berkurang.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka adalah jumlah penduduk. Secara umum penduduk adalah

setiap orang yang berdomisili atau bertempat tinggal di dalam wilayah suatu negara dalam waktu yang cukup lama. Jumlah penduduk di Provinsi Banten terus mengalami peningkatan. Meningkatnya jumlah pertumbuhan penduduk, maka jumlah tenaga kerja dan angkatan kerja juga ikut meningkat. Setiap penambahan angkatan kerja tidak terserap ke dalam lapangan kerja, maka akan mengakibatkan peningkatan yang terjadi pada pengangguran Angkatan kerja membutuhkan lapangan pekerjaan dan umumnya di Negara berkembang laju pertumbuhan penduduk (termasuk angkatan kerja) lebih besar daripada laju pertumbuhan lapangan kerja. Oleh karena itu tidak semua angkatan kerja bisa mendapatkan pekerjaan dan akhirnya menganggur. Maka, dalam hal ini peran pemerintah sangat penting.

Berikut adalah data jumlah penduduk di Provinsi Banten tahun 2015 – 2019 menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir jumlah penduduk terus mengalami kenaikan, ini terlihat dari jumlah penduduk pada tahun 2015 berjumlah 11.955.234 jiwa, dan pada tahun 2019 yaitu berjumlah 12.927.316 jiwa. Sedangkan untuk jumlah angkatan kerja pada tahun 2015 berjumlah 5.334.843 jiwa, dan pada tahun

2019 berjumlah 6.053.654 jiwa. Dari data jumlah penduduk, menggambarkan jumlah penduduk dan angkatan kerja, dimana jumlah penduduk naik maka angkatan kerja akan ikut naik, dan apabila pemerintah tidak bisa memberikan lapangan pekerjaan, maka tingkat pengangguran juga akan ikut naik.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh PMA, PMDN Dan Jumlah Penduduk Terhadap Pengangguran Di Provinsi Banten Tahun 2015 - 2019”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Menurunnya angka pengangguran di Provinsi pada kurun waktu 5 tahun terakhir. Namun, malah menjadikan angka pengangguran Banten menduduki peringkat pertama se - Indonesia dan angka itu lebih tinggi dari rata – rata pengangguran tingkat Nasional menurut hasil survei BPS.
2. Meningkatnya nilai investasi PMA dan PMDN di Provinsi Banten harusnya bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan

menyerap banyak tenaga kerja dan mempengaruhi jumlah angkatan kerja. Sehingga bisa berpengaruh pada pengangguran.

3. Tingginya jumlah penduduk maka menyebabkan jumlah tenaga kerja dan angkatan kerja ikut meningkat. Pertambahan angkatan kerja yang tidak terserap ke dalam lapangan kerja, maka akan mengakibatkan peningkatan yang terjadi pada pengangguran.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, karena adanya keterbatasan waktu, dana, tenaga, teori – teori, agar penelitian lebih terarah, terfokus serta tidak menyimpang dari tujuan utama penelitian. Maka, pada penelitian ini diberi pembatasan masalah. peneliti terfokus membahas mengenai Pengaruh PMA yang di lihat dari Realisasi nilai investasi PMA, PMDN yang di lihat dari Realisasi nilai investasi PMDN, Jumlah Penduduk dan Pengangguran yang dilihat dari tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Provinsi Banten Tahun 2015 – 2019.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka dapat di tarik rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Adakah pengaruh PMA terhadap Pengangguran di Provinsi Banten tahun 2015 – 2019?
2. Adakah pengaruh PMDN terhadap Pengangguran di Provinsi Banten tahun 2015 – 2019?
3. Adakah pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Pengangguran di Provinsi Banten tahun 2015 – 2019?
4. Seberapa besar pengaruh PMA, PMDN dan Jumlah Penduduk secara bersama - sama terhadap Pengangguran di Provinsi Banten tahun 2015 – 2019?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dilakukannya kegiatan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh PMA terhadap pengangguran di Provinsi Banten tahun 2015 – 2019.
2. Untuk mengetahui pengaruh PMDN terhadap pengangguran di Provinsi Banten tahun 2015 – 2019.
3. Untuk mengetahui pengaruh Jumlah Penduduk terhadap pengangguran di Provinsi Banten tahun 2015 – 2019.

4. Untuk mengetahui berapa besar pengaruh PMA, PMDN dan jumlah penduduk secara bersama – sama terhadap pengangguran di Provinsi Banten tahun 2015 – 2019.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, yaitu:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bagian dalam proses belajar, meningkatkan kemampuan berfikir melalui karya tulis ilmiah dan menjadi kesempatan untuk mempraktikkan teori – teori yang telah di pelajari selama masa perkuliahan di Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultan Maulana Hasanauddin Banten dengan pratek sesungguhnya di lapangan.

2. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini di harapkan dapat di gunakan sebagai bahan studi dan literatur bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian selanjutnya dalam cabang Ilmu Ekonomi sekaligus sebagai bahan referensi dan informasi bagi peneliti selanjutnya

khususnya yang berkaitan dengan pengaruh dari PMA, PMDN dan Jumlah Penduduk terhadap Pengangguran.

G. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan penjelasan sementara terhadap gejala – gejala yang menjadi obyek permasalahan. Tentang sintesa hubungan antara variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan, selanjutnya dianalisis secara kritis dan sistematis, sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan antar variabel yang diteliti, selanjutnya digunakan untuk merumuskan hipotesis.⁸

Pengangguran tidak berkaitan dengan mereka yang tidak ingin bekerja, tetapi tidak atau belum menemukan pekerjaan. Pengangguran terjadi karena jumlah angkatan kerja atau pencari kerja lebih banyak daripada lapangan kerja yang tersedia. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi tidak sanggup menciptakan kesempatan kerja lebih cepat dari pertumbuhan penduduknya.

Penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) memegang peranan yang penting sebagai

⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Cetakan Ke-26, (Bandung:Alfabeta 2017), hlm 60.

salah satu faktor dalam pembangunan. Melalui kegiatan investasi diharapkan akan meningkatkan produksi nasional, menggali ekonomi potensial menjadi ekonomi riil, meningkatkan lapangan pekerjaan, meningkatkan pemerataan hasil – hasil pembangunan, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan atau kegiatan ekonomi dan meningkatkan pemerataan pembangunan ke daerah. Sejalan dengan hal tersebut, investasi mempunyai arti penting didalam penyerapan tenaga kerja, karena dengan adanya investasi, baik nasional maupun asing, akan meningkatkan atau menghidupkan kembali sektor riil, dengan demikian juga akan menyerap tenaga kerja sehingga dengan adanya investasi ini akan membuka lapangan kerja baru.⁹ Dengan demikian, penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang dapat meningkatkan lapangan pekerjaan sehingga dapat mengurangi pengangguran.

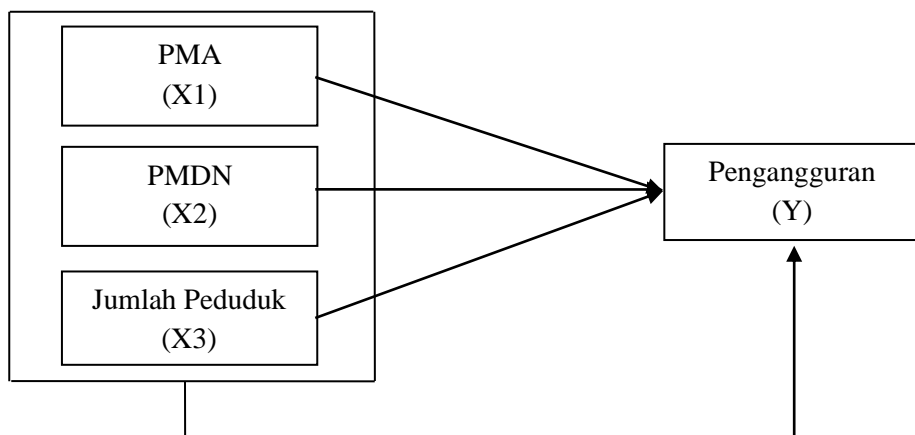
Jumlah penduduk menunjukkan total manusia atau penduduk yang menempati suatu wilayah pada jangka waktu tertentu. Malthus berpendapat tentang hubungan antara populasi, upah riil, dan inflasi. Ketika populasi buruh tumbuh lebih cepat dari pada

⁹ Abdul Hanan, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 139.

produksi makanan, maka upah riil turun. Ketika upah riil meningkat maka suatu perusahaan akan mengurangi jumlah tenaga kerjanya, sementara penawaran tenaga kerja lebih tinggi dari pada permintaan tenaga kerja maka akan terjadi pengangguran. Sedangkan menurut Emile Durkheim, ketika jumlah penduduk meningkat, maka akan timbul persaingan diantara penduduk untuk dapat mempertahankan hidup. Dalam memenangkan persaingan tiap-tiap orang berusaha untuk meningkatkan pendidikan dan keterampilan. Dengan demikian setiap orang berlomba untuk mendapatkan pekerjaan dan akan menekan tinggi nya jumlah pengangguran.

Gambar 1.1

Kerangka Pemikiran



Keterangan:

Variabel dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua variabel, yaitu variabel dependen (Y) dan variabel independe (X).

1. Variabel dependen sering disebut dengan variabel terikat.

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Pengangguran (Y).

2. Variabel indenpenden sering disebut sebagai variabel bebas.

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat).¹⁰ Variabel independen dalam penelitian ini adalah PMA (X1), PMDN (X2) dan Jumlah Penduduk (X3).

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada penelitian ini terdiri atas lima bab, Adapaun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan: Bab ini membahas latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah,

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Cetakan Ke-26, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 39.

tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran dan sistematika penulisan.

BAB II : Kajian Teoritis: Bab ini membahas mengenai kajian pustaka yang mencakup teori tentang variabel penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, hubungan antar variabel dan hipotesis penelitian.

BAB III : Metodologi Penelitian: Bab ini membahas mengenai waktu dan tempat penelitian, populasi dan sampel, metode penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan operasional variabel penelitian.

BAB IV : Hasil Penelitian Dan Pembahasan: Bab ini membahas mengenai gambaran umum objek penelitian, mengenai deskripsi data, analisis data dan hasil analisis yang telah dilakukan.

BAB V : Penutup: Bab ini membahas mengenai kesimpulan yang merupakan jawaban ringkas terhadap rumusan masalah. Kemudian terdapat saran yang direkomendasikan berdasarkan temuan penelitian yang telah dilakukan penulis.